



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, BUDAYA ORGANISASI DAN ANTI-FRAUD AWARENESS TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL, ORGANIZATIONAL CULTURE AND ANTI FRAUD AWARENESS ON FRAUD PREVENTION

Malahayati Ibrahim^{1*}, Poppy Nurmayanti², Novita Indrawati³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

*Email: malahayati@gmail.com

Keywords

*Internal Control,
Organizational culture,
Anti Fraud Awareness,
Fraud Prevention,*

Article information

Received:

2022-12-19

Accepted:

2023-02-24

Available Online:

2023-03-18

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of the government's internal control system, organizational culture, and Anti-Fraud Awareness on fraud prevention with individual morality as a moderating variable. The population in this study was Pekanbaru City Public Elementary School, totaling 176 Public Elementary Schools. Public Elementary Schools that will be given questionnaires are 3 (three) people who are authorized or involved in the management of BOS (School Operational Assistance), namely (1) Principals, (2) Treasurers, and (3) School Committees, so that the total population in this study is as many as 540 (five hundred thirty one) people/respondents. The sampling technique in this study was using saturated or census sampling. The data used are primary data sourced from questionnaires. Data analysis technique using moderation regression analysis (MRA). The results showed that the government's internal control system, organizational culture, and Anti-Fraud Awareness had an effect on fraud prevention. Individual morality moderated the effect of the government's internal control system, organizational culture, and Anti-Fraud Awareness on fraud prevention.

PENDAHULUAN

Usaha pencegahan *fraud* hendak lebih efisien dilakukan dibanding dengan melaksanakan usaha represif. Pencegahan dibutuhkan untuk menjauhi kemudharatan yang lebih besar serta hancurnya nama baik institusi ataupun orang. Tidak hanya itu, *fraud* yang tidak lekas ditangani serta terbongkar sebab lambatnya penindakan hendak semakin berikan kesempatan pelaku untuk menutupi tindakannya dengan ketakjujuran yang lain. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha guna melaksanakan pencegahan terhadap terbentuknya ketakjujuran yang sepadan serta tepat target, alhasil seluruh wujud serta usaha penerapan ketakjujuran bisa diantisipasi secepat mungkin supaya bebas dari resiko kerugian (Kurniasari, 2017).

Upaya pencegahan *fraud* yang belum berjalan dengan baik dan efektif mengakibatkan meningkatnya tindak *fraud* diberbagai sektor di Indonesia diantaranya merupakan bagian pendidikan. Bagian pendidikan sepatutnya jadi tempat yang benar-benar bersih dari tindakan *fraud*. Aspek pendidikan menduduki 4 sampai 5 besar selaku aspek yang sangat banyak



mempunyai permasalahan penggelapan dengan jumlah permasalahan yang bertambah tiap tahunnya. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* melakukan pencarian kepada subjek yang mudah dikorupsi serta ada 17 subjek yang rawan korupsi yakni sektor pendidikan, terhitung perihal Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bentuk usaha Departemen Pendidikan serta Kebudayaan dalam mendukung anggaran pendidikan untuk peserta didik di tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA). Program anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku salah satu wujud penganggaran pendidikan dasar yang penting dari basis anggaran Perhitungan Pemasukan serta Belanja Negara (APBN). Akan tetapi pada prakteknya masih banyak ada penyimpangan dan ketidakjujuran pada pengelolaan perhitungan BOS yang dilakukan oleh pihak khusus untuk kepentingan pribadi. *Fraud* yang terjadi di dalam suatu organisasi pemerintahan dikarenakan kurangnya pengawasan yang baik dan kegagalan pemerintah dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan (Diyah, 2021).

Minimnya keterbukaan serta akuntabilitas terkait pengelolaan anggaran BOS ditingkat sekolah menyebabkan sering terjadi *fraud* terhadap dana BOS. Menurut Wardani (2019), terdapat sebagian perihal yang menjadi sebagai aspek terbentuknya *fraud* dalam Anggaran BOS, yakni: Pertama, perhitungan pendidikan yang lumayan besar alhasil kesempatan untuk terbentuknya penggelapan juga terbuka lebar. Kedua, psikologis para manager pendidikan masih terbiasa dengan praktek Penggelapan, Kolusi serta Nepotisme (KKN). Ketiga, relatif pengawasan publik masih kurang optimal kepada pelaksana pendidikan.

Pengelolaan anggaran BOS selama ini merupakan pada kontrol kepala sekolah, dimana amat minimnya andil warga sekolah ataupun terlebih lagi tanpa keikutsertaan warga sekolah sama sekali dalam memantau peruntukan anggaran BOS itu, seperti contohnya andil orangtua anak didik, panitia sekolah, guru, serta warga sekitar sekolah yang sepatutnya ikut dan memantau bagaimana keterbukaan dari pihak sekolah untuk partisipasi perhitungan anggaran BOS untuk tiap- tiap peserta didik (Suastawan, 2017). Sedikitnya keterlibatan publik dalam memantau pengelolaan anggaran BOS di sekolah memunculkan permasalahan penyimpangan sampai ketidakjujuran dalam pengelolaannya. Sebagian penyimpangan anggaran BOS yang timbul semacam pungutan liar, suap, serta ketidaktaatan pada langkah teknis pemakaian Anggaran BOS.

Pencegahan *fraud* yang belum optimal mengakibatkan terjadinya ketidakjujuran dalam pengelolaan anggaran BOS seperti persoalan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 167 Kota Pekanbaru pada November 2020. Meskipun menerima dana BOS, sekolah tersebut konsisten memberati para orangtua peserta didik dengan bermacam pungutan seperti pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pembayaran uang komputer. Padahal, selama masa pandemi siswa tidak pernah menggunakan komputer di sekolah (Basril, 2020).

Berdasarkan dari kasus di atas, menunjukkan bahwa usaha pencegahan *fraud* yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dalam pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal. Artinya ada beberapa kebijakan dan prosedur pemerintah yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Beberapa kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya adalah: Menerbitkan peraturan perihal peranan peliputan LHKPN, semua pelaksana negara yang masuk golongan harus memberi tahu sehingga harus melaporkan semua hartanya serta telah melaksanakan penerimaan karyawan dengan cara jujur serta terbuka memakai sistem CAT guna menghindari serta memberantas perbuatan kejahatan penggelapan yang berhubungan dengan suap menyuap. Selain itu, pemerintah juga membuka akses untuk warga untuk ikut melaksanakan pengawasan dalam menghindari penggelapan yang diatur pada perpres No. 43 tahun 2018, dimana warga diharapkan ikut berperan aktif memberi tahu aksi yang menjurus pada ketidakjujuran.

Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah menerapkan pendidikan anti korupsi untuk seluruh tahapan pendidikan, dimana mahasiswa serta yang lain diharapkan bisa berperan selaku agen pergantian serta sudah membuat budaya bersih dengan menciptakan *zero fraud governance*, dengan menerapkan teknologi seperti e-samsat, e-tilang, *e-procurement*, *e-budgeting*, dan yang lainnya guna menghindari terbentuknya ketidakjujuran dalam proses pengurusannya serta membuat area integritas anti-korupsi.

Pemerintah telah melaksanakan optimalisasi serta penerapan pendidikan anti penggelapan dalam tahapan pendidikan dasar serta menengah, melaksanakan edukasi teknis integritas untuk seluruh administratur eselon III serta IV, melaksanakan edukasi teknis kelola aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) serta penilaian tindak lanjut konsep aksi zona sumber daya alam, mendorong penguatan Petugas Pengawas Internal Pemerintah dalam bekerja sama dengan Petugas Penegak Hukum guna pencegahan serta penindakan korupsi. Usaha penguatan instansi publik pula sudah dilakukan pada pengawasan pencegahan, serta melaksanakan aksi Riau Go IT ialah: memberikan jasa terbaik berbasis teknologi data pada warga khususnya pada kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan serta fungsi pemerintah, penyebaran data, serta jasa publik. Kemudian kurang optimalnya pencegahan *fraud* yang dilakukan di sekolah-sekolah karena lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, karena dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru hanya melakukannya pada beberapa SD saja. Seharusnya pengawasan dilakukan di seluruh SD di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fakta tersebut kita dapat melihat bahwa masih maraknya terjadi tindak penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS yang tidak dikelola dan diawasi sebagaimana mestinya. Padahal seharusnya anggaran BOS dipakai guna penuhi keinginan sekolah dalam sediakan sarana belajar mengajar. Sebab, pengelolaan anggaran BOS yang sangat penting ialah kurangi iuran sekolah yang dibayarkan oleh peserta didik apalagi terdapat sekolah yang menghapuskan iuran sekolah yang sepatutnya dibayarkan oleh orang tua peserta didik sebab mendapat anggaran BOS. Anggaran Atasan ialah program pemerintah untuk sediakan perhitungan non-personalia untuk unit pendidikan dasar, walhasil dalam perihal ini memerlukan adanya suatu sistem pengawasan serta pengaturan langsung dari pemerintah guna menyusun pembagian perhitungan yang disebut sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan metode yang integral dalam tindakan dan juga kegiatan yang dilakukan dengan metode terus menerus oleh bimbingan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan mencukupi atas tercapainya tujuan tim dengan kegiatan yang berdaya guna dan berdaya guna, keandalan pelaporan finansial, kontrol aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada perihal pencegahan ketidakjujuran serta pemberantasan penggelapan, antara lain ialah diadakannya pemasyarakatan guna pencegahan, dimana tenaga kerja diberikan keringanan untuk memberi tahu seluruh aksi yang menjurus pada ketidakjujuran dengan *whistleblowing system* yang bisa diakses via telepon, faksimile, sms, *website*, surel dan pengiriman surat.

Budaya merupakan salah satu bagian yang jadi atensi untuk industri atau kelompok dalam usaha pencegahan *fraud*. Budaya kelompok bisa dimaksud selaku suatu sistem penyebaran keyakinan serta nilai-nilai yang bertumbuh pada suatu kelompok serta memusatkan sikap anggota-anggotanya (Suastawan, 2017). Budaya yang segar serta kokoh hendak membuat banyak orang yang terdapat di pada industri untuk bertugas dengan cara tanggung jawab serta berkomitmen guna melaksanakan bidang usaha industri dengan cara baik serta terbebas dari usaha aksi kecurangan.



Kesadaran *anti-fraud* (*anti-fraud awareness*) merupakan usaha untuk meningkatkan pemahaman perihal pentingnya usaha pencegahan ketakjujuran oleh seluruh pihak dalam kelompok. Pemahaman *anti-fraud* yang efisien hendak menguatkan pengawasan pada kelompok hirarkis serta menurunkan fraud pada kelompok (Zarefar dan Arfan, 2017). Menurut Tuanakotta (2020), berkata ada 2 rancangan dalam usaha pencegahan fraud tidak hanya pengaturan internal, yakni meningkatkan pemahaman mengenai terdapatnya ketakjujuran (*fraud awareness*).

Moralitas merupakan niat untuk menjajaki seluruh perihal yang ada pada hati individu serta diketahui selaku peranan mutlak. Sedangkan bermoral merupakan pertimbangan baik dan buruk, berakhlak baik. Liyanarachchi dan Newdick (2009) menyatakan tingkat penalaran moral yang besar hendak mendesak seorang guna melaksanakan tindakan yang benar. Selain itu moralitas individu sebagai variabel moderating digunakan dalam riset ini sebab moralitas individu memiliki pengaruh terhadap kinerja seseorang. Menurut Aranta (Admadja dan Saputra, 2017), moralitas pribadi seseorang amat memiliki peran penting selaku yang memegang komitmen pelaksanaan rezim serta pembangunan yang sesuai dengan konstitusi, membela terhadap kepentingan masyarakat, tembus pandang, akuntabel serta tidak korupsi.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan fraud

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 SPIP adalah metode yang integral dalam kelakuan dan kegiatan yang dilakukan dengan metode terus-menerus oleh arahan dan juga seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memenuhi atas tercapainya misi organisasi dengan kegiatan yang praktis dan berdaya guna, keandalan pelaporan finansial, kontrol aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan internal pada suatu industri diyakini bisa berguna dalam perihal membantu industri dalam pencegah terbentuknya *fraud* (Wahyuni, 2017).

Penelitian Wardana *et al* (2017), Widiyarta *et al* (2017), dan Ariastini *et al* (2017) yang menerangkan jika sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi positif pada pencegahan ketakjujuran. Perihal ini berarti jika semakin besar implementasi sistem pengendalian internal pemerintah secara maksimal sehingga semakin tinggi tingkatan pencegahan kecurangan.

H₁: Pengendalian Internal Pemerintah yang semakin baik dapat mencegah fraud

Budaya organisasi adalah aturan-aturan, nilai, anggapan, keyakinan, Kerutinan yang dibentuk dalam organisasi serta diketahui oleh seluruh pihak dalam organisasi selaku prinsip ataupun referensi pada organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya baik yang diperuntukkan untuk pegawai ataupun untuk kebutuhan orang lain (Suastawan *et al.* 2017).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat ditentukan oleh tiga variabel *antecedent*, salah satunya adalah *attitude* (sikap), Kecurangan bisa dicegah dengan baik bila tindakan serta budaya dari tiap-tiap orang terkategori bagus. budaya melaksanakan seluruh perihal dengan jujur serta etika yang besar jadi faktor dalam menghindari terbentuknya ketakjujuran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017), Suastawan *et al* (2017), Anandya dan Werastuti (2020) dan Hambani *et al* (2020) membuktikan bila budaya organisasi berpengaruh signifikan positif pada pencegahan ketakjujuran. Alhasil bisa didapat kesimpulan jika semakin baik budaya organisasi akan semakin membuat peningkatan pada pencegahan *fraud*.

H₂: Budaya Organisasi yang baik dapat mencegah fraud.

Pengaruh Anti-fraud awareness terhadap Pencegahan fraud

Kesadaran anti- fraud ataupun anti- fraud awareness ialah suatu usaha guna meningkatkan pemahaman hal pentingnya usaha pencegahan ketakjujuran oleh seluruh pihak dalam organisasi. Pemahaman anti- fraud yang efisien berikutnya hendak menguatkan pengawasan organisasi hirarkis serta menurunkan fraud pada organisasi (Zarefar dan Arfan, 2017).

Hubungan *Anti-fraud awareness* dan *Planned Behavior Theory* merupakan selaku aturan subjectif. Fraud hendak timbul bila ada titik berat, peluang, rasionalisasi serta keterampilan akan jadi sebab seseorang untuk mempunyai hasrat melaksanakan suatu aksi ketakjujuran. Dengan demikiaan hasrat itu hendak berganti jadi aksi ataupun sikap yang menyimpang yakni melaksanakan ketakjujuran (fraud). Dengan begitu tiap orang hasus mempunyai pemahaman guna tidak melaksanakan aksi ketakjujuran apapun wujudnya.

Hasil penelitian Yuniarti (2017), Prena dan Kusmawan (2020), Naulita (2020) menyatakan bahwa *anti-fraud awareness* memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pencegahan *fraud*. Artinya terdapatnya *anti-fraud awareness* akan memberikan kesadaran agar tidak melakukan aksi kecurangan.

H3: *Anti-fraud awareness* yang semakin baik dapat mencegah *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

SPIP merupakan sistem yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencegah ketidakjujuran. Namun, setiap sistem memiliki kelemahan yang memungkinkan celah terbentuknya ketidakjujuran. implementasi suatu sistem terkait pada individu yang melakukan sistem tersebut. Individu yang beradab baik hendak menjauhi aksi tidak jujur, begitu pula kebalikannya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat ditentukan oleh tiga *variabel antecedent*, salah satunya adalah *Perceived Behavioral Control* (*Kontrol Perilaku*). Moralitas berhubungan dengan sikap individu, dimana bila individu ada pada kondisi tertekan, terdapat peluang serta pembenaran bisa melakukan kecurangan (Cressey, 1953). Kohlberg (1969) mengatakan penalaran moral individu dibagi atas 3 langkah yakni dimana orang berpendapat baik dan kurang baik dari akibat berbentuk hadiah atau sanksi yang ditimbulkan dari tingkah lakunya Pra Conventional), setelah itu individu berperan atas dasar penilaian orang lain (Conventional), dan orang sudah bisa melihat dengan sudut pandang yang seimbang tercantum determinasi dan hukum umum serta menimbang keinginan masing-masing orang pada tiap suasana (*Post Conventional*).

Berdasarkan hal tersebut kesuksesan implementasi sistem wajib searah serta dibantu dengan penalaran etiket individu yang baik. Moralitas individu yang baik hendak menghindari terbentuknya kecurangan, baik terdapat atau sedikit pengawasan dari suatu sistem. Hasil penelitian Laksmi dan Sujana (2019) merumuskan jika moralitas memiliki pengaruh positif signifikan pada pencegahan fraud. Moralitas tinggi yang dilihat dari sikap baik seorang serta hendak mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan.

H4: Moralitas individu yang semakin baik dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud*.



Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

Pemahaman mengenai adanya fraud bisa dimasukkan kedalam suatu budaya organisasi, dalam hal ini budaya organisasi berarti mendeskripsikan sistem yang dipercayai oleh para anggota suatu organisasi atau instansi yang jadi suatu hal yang membedakan organisasi atau instansi dengan kelompok atau instansi yang lain. Tuanakota (2010), adat organisasi atau industri ialah nilai yang dirasakan bersama oleh para anggota organisasi yang direalisasikan dalam bentuk aksi tindakan atau komitmen pada organisasi atau industri. Budaya organisasi pula digunakan berlaku seperti salah satu perkakas manajemen untuk mencapai kinerja, efektivitas, daya produksi, dan etos kerja yang baik dan sesuai dengan misi yang ingin dicapai (Sutrisno, 2013).

Budaya organisasi amatlah berarti dalam suatu organisasi, sebab badan organisasi hendak menanamkan jiwa kesetiannya kepada organisasi serta hendak bersungguh-sungguh dalam membantu supaya misi organisasi itu dapat berhasil serta dengan ditanamkannya budaya organisasi pada tiap anggota organisasi, maka hendak menghindari ataupun memperkecil terjadinya *fraud*.

Moralitas merupakan kebiasaan baik. Adat kebiasaan baik ini setelah itu jadi sistem nilai dengan peran selaku prinsip serta tolak ukur tingkah laku yang benar atau tidak benar. Secara etimologis, etika serupa dengan tutur akhlak sebab dua kata itu memiliki maksud yakni kebiasaan, adat. Dengan tutur lain, etika merupakan nilai serta aturan-aturan yang jadi pegangan untuk seorang ataupun suatu golongan dalam menata tingkah lakunya. Moralitas individu memiliki peran terhadap budaya organisasi yang dijalan seseorang atau organisasi. Apabila seseorang atau organisasi mempunyai moralitas individu didalam dirinya, maka nilai yang akan terwujud dalam wujud tindakan sikap ataupun komitmen dalam organisasi ataupun industri serta bisa menghindari ataupun menurunkan terbentuknya ketidakjujuran. Bersumber pada penjelasan diatas serta riset lebih dahulu, sehingga hipotesis yang diajukan periset ialah sebagai berikut:

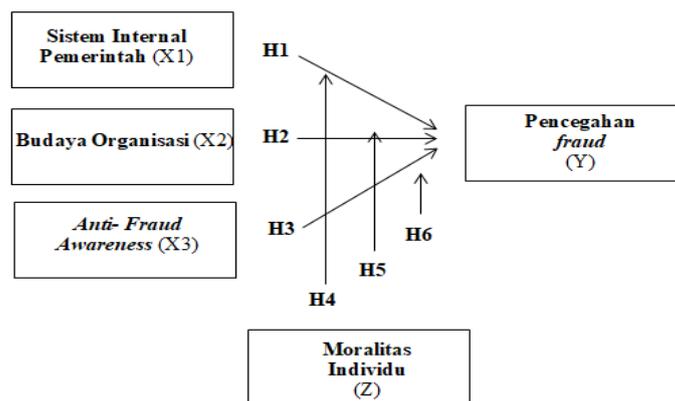
H₅: Moralitas Individu yang semakin baik dapat memperkuat budaya organisasi terhadap pencegahan fraud.

Pengaruh Anti-fraud awareness terhadap Pencegahan fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

Kesadaran anti kecurangan (*anti-fraud awareness*) merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen serta karyawan dengan cara Bersamaan. Akan tetapi, membuat budaya kejujuran serta etika baik wajib dimulai oleh manajemen. Manajemen hendak jadi contoh untuk karyawan alhasil karyawan hendak mencontoh sikap dari manajemen. Tidak hanya itu, manajemen pula bertanggung jawab guna memitigasi resiko terbentuknya ketidakjujuran dengan perbaikan area kerja positif serta konstruktif yang memberikan dukungan penghindaran ketidakjujuran. Pada pihak karyawan, pemahaman anti kecurangan hendak memberikan peningkatan pada perhatian terhadap resiko ketidakjujuran yang bisa terjalin di area kerja. Ketakjujuran hendak lebih mudah dideteksi serta dilindungi dengan sendirinya sebab karyawan telah memiliki pemahaman serta kepedulian akan ancaman perbuatan kecurangan di area kerja.

Semakin besar moralitas pribadi yang dimiliki oleh seorang karyawan maka hendak memberikan adat kebiasaan yang baik. Perihal ini setelah itu jadi sistem nilai yang berperan selaku prinsip serta tolak ukur tingkah laku yang benar atau tidak benar yang dilakukan oleh seorang karyawan untuk meningkatkan kepedulian serta pencegahan kepada ketidakjujuran.

H₅: Moralitas Individu yang semakin baik cenderung dapat memperkuat anti-fraud awareness terhadap pencegahan fraud



Gambar 1
Model Penelitian

Sumber: Data olahan peneliti, 2022

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini merupakan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kota Pekanbaru yang berjumlah 176 SD Negeri. SD Negeri yang akan diserahkan kuesioner sejumlah 3 (tiga) orang yang diberi wewenang ataupun ikut serta pada pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ialah (1) Kepala Sekolah, (2) Bendaharawan, serta (3) Panitia Sekolah, alhasil jumlah populasi pada riset ini merupakan sejumlah 540 (lima ratus tiga puluh satu) orang atau responden. Ada pula metode pengumpulan sampel pada riset ini merupakan memanfaatkan sampling jenuh ataupun sensus ialah metode pengumpulan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai peneli ini merupakan data primer. Pada riset ini, data primer didapat dengan catatan statment kuesioner yang diserahkan pada responden, Data riset ini ialah cross section data yakni data yang digabungkan dalam satu durasi tertentu. Ada pula metode yang digunakan guna mendapatkan data yakni memakai kuesioner yang memanfaatkan daftar pertanyaan pada pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diawasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memanfaatkan teknik regresi linier berganda serta *Moderating Regression Analysis* (MRA).

Dapat dirumuskan analisis regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Pada riset ini MRA yang dipakai merupakan jenis regresi moderasi sederhana, dengan persamaan tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Model 1 : } & Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \varepsilon \\ & Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 * Z + \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Model 2 : } & Y = \alpha_2 + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \varepsilon \\ & Y = \alpha_2 + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \beta_3 X_2 * Z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Model 3 : } & Y = \alpha_3 + \beta_1 X_3 + \beta_2 Z + \varepsilon \\ & Y = \alpha_3 + \beta_1 X_3 + \beta_2 Z + \beta_3 X_3 * Z + \varepsilon \end{aligned}$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *fraud*

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi Berganda

X₁ = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X₂ = Budaya Organisasi



X_3 = Anti-Fraud Awareness

Z = Moralitas Individu

X1.Z = Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Moralitas Individu

X2.Z = Hubungan antara Budaya Organisasi dengan Moralitas Individu

X4.Z = Hubungan antara Anti-Fraud Awareness dengan Moralitas Individu

e = Error (Variabel lainnya yang berpengaruh)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPIP (X1)	436	2	5	4,43	0,6127
Budaya (X2)	436	2	5	4,15	0,8182
Anti Fraud (X3)	436	2	5	4,12	0,8972
Pencegahan Fraud (Y)	436	2	5	4,30	0,5469
Moralitas (Z)	436	2	5	4,08	0,8531
Valid N (listwise)	436				

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Hasil Pengujian Validitas

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui jika tiap-tiap unsur pernyataan bagi variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, budaya organisasi, *anti fraud awareness*, moralitas individu, serta pencegahan *fraud* memenuhi kriteria 0,1381 (r tabel). Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau dengan cara statistik tiap-tiap indikator pernyataan merupakan valid serta pantas digunakan selaku data penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Standar	Cronbach's Alpha	Keterangan
SPIP (X1)	0,60	0,617	Reliabel
Budaya Organisasi (X2)	0,60	0,700	Reliabel
Anti Fraud (X3)	0,60	0,809	Reliabel
Pencegahan Fraud (Y)	0,60	0,799	Reliabel
Moralitas Individu (Z),	0,60	0,603	Reliabel

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Bersumber pada Tabel 3 ditunjukkan jika koefisien reliabilitas instrumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1), budaya organisasi (X2), *Anti Fraud Awareness* (X3), Pencegahan *Fraud* (Y), Moralitas Individu (Z), membuktikan angka koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60 alhasil bisa ditarik kesimpulan jika seluruh instrumen pada riset merupakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov smirnov didapatkan angka yang signifikan yaitu 0,087 yang artinya lebih dari 0,05, sehingga bisa ditarik kesimpulan jika data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, ditunjukkan jika VIF bagi semua variabel bebas kurang dari angka 10 serta demikian pula nilai tolerance melebihi 0,10. Perihal itu bisa menarik kesimpulan jika model regresi itu tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji *glejser* membuktikan kalau totalitas variabel mempunyai angka sig. lebih dari 0,05, alhasil bisa ditarik kesimpulan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengenali seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel independen dengan parsial pada menjelaskan variabel dependen alhasil didapatkan hasil variabel apakah yang sangat besar memengaruhi variabel dependen yakni sistem pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi, serta *anti-fraud awareness*, Hasil uji regresi linier berganda dibuktikan dalam Tabel 4:

Tabel 4

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig	Kesimpulan
(Constant)	11.200	8.727	0.000	
SPIP (X1)	.135	4.646	0.000**	Signifikan
Budaya (X2)	.640	29.342	0.000**	Signifikan
Anti Fraud (X3)	.047	2.775	0.006**	Signifikan

**mengindikasikan signifikansi pada tingkat 5%,

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

Hasil regresi pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₁) kepada pencegahan *fraud* (Y) menghasilkan angka $t_{hitung} 4,646 > t_{tabel} 1,971$ dengan nilai $P_{value} 0,000$ lebih kecil dari 0,05. Nilai t bernilai positif. Alhasil Ho ditolak serta Ha diterima yang berarti Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh positif juga signifikan kepada pencegahan *Fraud*.

Bersumber pada hasil pengujian hipotesis dibuktikan jika sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh kepada pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal ini berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena membuktikan visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah berlangsung cocok dengan rencana, pengaturan, serta pemantauan. Hasilnya perilaku ketidakjujuran bisa dihindari. Berpengaruhnya SPIP terhadap pencegahan *fraud* membuktikan bahwa tujuan organisasi sudah berjalan efektif dan efisien untuk melakukan pencegahan *fraud*, diantaranya dengan meningkatkan reportase keuangan serta kepatuhan pada hukum.

Berdasarkan teori motivasi yaitu karena terdapat sistem pengendalian internal pemerintah yang diaplikasikan secara efisien hendak mendorong seseorang untuk memiliki motivasi positif diantaranya adalah berperilaku positif sehingga tindakan *fraud* dapat diminimalisir. Pengendalian/pengaturan internal yang efisien amat dibutuhkan pada melakukan strategi penangkalan, dengan dibentuk serta diterapkannya pengendalian internal, didambakan jadi energi untuk mencegah kecurangan yang dilaksanakan. Siagian (2004), menyatakan target dari teori motivasi ialah pemenuhan keinginan yang sifatnya pokok. Motivasi guna mencegah penyelewengan berkaitan dengan dorongan positif. Mulyadi (2014), mengatakan sebenarnya pengendalian internal merupakan sistem pengaturan yang mencakup metode, struktur organisasi, serta skala yang dibentuk guna melindungi aset perusahaan, memeriksa akurasi, serta kekuatan informasi akuntansi. Dengan terdapatnya pengaturan yang efisien, bisa dibuktikan jika angka terbentuknya penyelewengan akuntansi bisa diturunkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu organisasi memerlukan sebuah uraian tentang pengaturan internal yang hendak diaplikasikan didalam organisasi. Dimana bila hal itu diimplementasikan dengan efisien sehingga bisa menghindari terbentuknya ketidakjujuran. Perihal serupa dipaparkan oleh Cuomo (2007) yang menjelaskan bahwa diimplementasikan pengendalian internal dalam organisasi profit maupun non-profit bisa menjaga kekayaan organisasi dari *fraud* serta pastinya hendak menolong manajemen guna melakukan seluruh kegiatannya.

Salah satu faktor pengaturan internal adalah aktivitas pengaturan yang mengedepankan



jika pimpinan lembaga pemerintah harus mengadakan aktivitas sesuai dengan skala, dimensi, serta sifat dari fungsi serta kewajiban lembaga pemerintah yang berkaitan. Contoh wujud penerapan aktivitas pengaturan yakni pengendalian fisik atas kekayaan. Tiap aktivitas operasional yang terdapat di instansi pemerintah membutuhkan aset yang mencukupi guna memperoleh target aktivitas. Aset saat pemakaiannya wajib dipantau supaya pas dengan metode yang sudah ditentukan. Pemakaian aset yang ditangani dengan efisien bisa menghindari aksi penyelewengan di lembaga pemerintah dengan mengaplikasikan pengendalian internal yang efisien. Sistem pengendalian internal menggenggam kedudukan utama pada perusahaan guna mengurangi terbentuknya ketidakjujuran. Sistem pengendalian internal yang efisien hendak memutus kesempatan terbentuknya kecondongan guna aksi penyelewengan.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* bertambah bersamaan dengan keefektifan system pengendalian internal pemerintah. Hasil riset ini searah dengan hasil riset yang dilakukan Wardana *et al.* (2017), (Widiyarta *et al.* 2017), dan (Ariastini *et al.* 2017) yang membuktikan jika sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif kepada pencegahan *fraud*. Perihal ini artinya bahwa makin besar pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintah secara maksimal alhasil makin besar pula tingkat pencegahan *fraud*.

Pengaruh Budaya Organisasi (X₂) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

Hasil regresi pengaruh budaya organisasi (X₂) kepada pencegahan *fraud* (Y) memperoleh angka t_{hitung} sebesar $29.342 > t_{tabel}$ 1,971 dengan nilai P_{value} 0,000 kurang dari 0,05. Nilai t bernilai positif. Alhasil H_0 ditolak serta H_a diterima yang berarti budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan kepada pencegahan kecurangan.

Hasil riset ini membuktikan jika budaya organisai mempunyai pengaruh positif signifikan kepada pencegahan penyelewengan. Perihal itu menunjukkan jika semakin tinggi budaya organisai alhasil makin meningkat penghindaran kecurangan. Budaya organisasi yang baik sangat krusial pada menghindari tindakan ketidakjujuran. Menurut Sulistiyowati (2007), budaya organisasi yang bagus tidak memberikan kesempatan sedikitpun untuk tiap orang guna melaksanakan kecurangan, sebab budaya organisasi yang bagus hendak membuat tiap individu yang terdapat di perusahaan memiliki rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) serta rasa bangga jadi bagian dari perusahaan itu (*sense of identity*). Dengan begitu bisa dibilang jika budaya organisasi yang bagus amat utama pada penghindaran aksi penyelewengan. Aksi penghindaran bisa diaplikasikan lewat budaya kerja yang diterapkan dengan baik dimana budaya itu hendak membuahkan nilai pokok perusahaan yang baik semacam meluhurkan integritas, kejujuran, serta lainnya yang berkaitan, dengan terdapatnya budaya organisasi yang baik serta dugaan kepada tindak kecurangan.

Budaya organisasi menggambarkan kepribadian sebuah perusahaan, prinsip untuk semua bagian perusahaan pada melakukan kewajibannya. Budaya yang kokoh merupakan perlengkapan guna berkompetisi pada sebuah perusahaan, bila budaya di sebuah perusahaan memiliki kerutinan yang buruk, alhasil hendak berakibat buruk pula untuk perusahaan itu sendiri, dan menjadi sulit untuk perusahaan itu memperoleh target yang hendak diperoleh. Budaya yang terdapat di organsiasi menggambarkan informasi mengenai bagaimana sikap karyawan yang sepatutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wulandari (2017), Suastawan *et al* (2017), Anandya dan Werastuti (2020), serta Hambani *et al*, (2020) yang membuktikan jika budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan positif kepada pencegahan *fraud*.

Pengaruh Anti-Fraud Awareness (X₃) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

Hasil regresi pengaruh *anti-fraud awareness* (X₃) terhadap pencegahan *fraud* (Y) memperoleh hasil $t_{hitung} 2.775 > t_{tabel} 1,971$ dengan nilai $P_{value} 0,006 < 0,05$. Nilai t bernilai positif. Alhasil Ho ditolak serta Ha diterima berarti *Anti-Fraud Awareness* berpengaruh positif dan signifikan kepada pencegahan *fraud*. Bersumber pada hasil hipotesis didapatkan jika *anti-fraud awareness* mempunyai pengaruh kepada pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi kesadaran individu kepada kecurangan alhasil hendak makin bedar penghindaran kecurangan yang dilaksanakan. *Fraud* hendak timbul jika ada peluang, tekanan, rasionalisasi serta daya hendak jadi unsur individu guna mempunyai hasrat melaksanakan sebuah aksi penyelewengan. Dengan begitu hasrat itu hendak berganti jadi sikap ataupun aksi yang merugikan yakni melaksanakan ketidakjujuran (*fraud*). Dengan begitu tiap individu wajib mempunyai pemahaman guna tidak mencoba aksi ketidakjujuran apapun itu tindakannya.

Pemahaman *anti-fraud* maupun *anti-fraud awareness* adalah sebuah usaha guna meningkatkan pemahaman tentang utamanya usaha penghindaran penyelewengan bagi seluruh pihak pada perusahaan. Pemahaman *anti-fraud* yang efisien berikutnya hendak menguatkan pengawasan kelompok hirarkis serta mengurangi ketidakjujuran pada perusahaan (Zarefar dan Arfan, 2017). *Anti-fraud awareness* ialah usaha guna meningkatkan pemahaman tentang krusialnya penghindaran ketidakjujuran bagi seluruh orang di perusahaan. Lewat pemahaman *anti-fraud* yang besar ditujukan bisa meningkatkan afeksi serta sensitivitas seluruh individu kepada ancaman ketidakjujuran serta pengaturan yang dibutuhkan guna menangkal penyelewengan (Wulandari dan Nuryanto, 2018). Hasil riset ini sejalan dengan hasil penelitian Yuniarti (2017), Prena dan Kusmawan (2020) dan Naulita, (2020) membuktikan jika *anti-fraud awareness* mempunyai pengaruh positif serta signifikan kepada pencegahan *fraud*. Ini berarti dengan terdapatnya *Anti-fraud awareness* hendak meningkatkan pemahaman guna tidak melaksanakan aksi ketidakjujuran.

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 ^a	.757	.755	1.594

a. Predictors: (Constant), Anti *Fraud* (X₃), SPIP (X₁), Budaya (X₂)
 b. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* (Y)

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Tabel 5 menunjukkan jika angka *adjusted R Square* yang didapatkan sebesar 0,755 atau 75,5 %. Yang berarti, Sistem Pengendalian Internal, budaya organisasi, serta *Anti Fraud Awareness* berpengaruh pada pencegahan *fraud* sebesar 75,5 %. Sementara sisanya 24,5 % berpengaruh dari faktor yang lain.

Hasil Uji Moderated Regresi Analysis (MRA)

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 6

Hasil Moderated Regresi Analysis (MRA)

Variabel	Koefisien	t	Sig	Kesimpulan
(Constant)	112.500	5.439	0.000	
SPIP (X ₁)	1.690	3.640	0.000**	Signifikan
Moralitas (Z)	3.476	4.226	0.000**	Signifikan
X ₁ *Z	0.083	4.527	0.000**	Signifikan

**mengindikasikan signifikansi pada tingkat 5%,

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022



Dari hasil regresi Tabel 6 diperoleh informasi jika angka b2 (signifikan), serta nilai b3 (juga signifikan), perihal tersebut menandakan jika moralitas individu adalah variabel *quasi moderator*, artinya variabel moralitas individu bisa berfungsi selaku variabel moderasi bersamaan selaku variabel bebas, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis. Tabel 6 memperoleh t_{hitung} interaksi $4,527 > t_{tabel}$ 1,971, dengan nilai P_{value} $0,000 < 0,05$, sehingga H4 diterima. Maka bisa ditarik kesimpulan jika ikatan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta moralitas individu ($X_1 * Z$) mempunyai pengaruh yang signifikan kepada pencegahan *fraud* (Y). Angka β (Beta) yang positif mengindikasikan jika moralitas individu memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada pencegahan kecurangan.

Bersumber pada hasil hipotesis didapatkan jika moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal kepada pencegahan *fraud*. Perihal tersebut dikarenakan moralitas yang dipunyai oleh pegawai telah terbilang amat bagus alhasil bisa menambah implementasi sistem pengendalian internal pemerintah yang baik pula serta kemudian bisa menghindari ketidakjujuran. Moralitas individu yang baik merupakan dorongan intrinsik yang intinya berada pada diri seseorang, dengan dorongan yang baik, dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuan organisasi termasuk dalam menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah sehingga upaya pencegahan ketidakjujuran bisa ditumbuhkan.

Hasil ini sesuai dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh Robbins (2003) jika dorongan sebagai sebuah cara yang membuahkan sebuah keseriusan, arah, serta intensitas perseorangan pada upaya guna menggapai sebuah target. Keseriusan yang besar tidak akan memperoleh hasil yang didambakan melainkan jika usaha itu ditujukan ke sebuah sasaran yang bermanfaat bagi perusahaan. Sebab itu, kita wajib memikirkan mutu dari usaha tersebut ataupun keseriusannya. Usaha yang ditujukan pada misi perusahaan ialah usaha yang sepatutnya diupayakan. Kesimpulannya, motivasi mempunyai format intensitas. Ini merupakan skala mengenai berapa lama individu bisa mempertahankan kemampuannya. orang-orang yang termotivasi konsisten dalam pekerjaan yang lumayan lama guna menggapai target mereka.

Tuanakotta (2012) membuktikan jika pengendalian internal ialah tahap pertama pada penghindaran *fraud*. Penghindaran ketidakjujuran ini biasanya merupakan kegiatan yang dilakukan pada penentuan aturan, sistem serta metode yang menunjang jika aksi yang dibutuhkan telah dilaksanakan manajemen, badan komisaris, serta pihak lainnya pada perusahaan guna bisa membagikan pemahaman memuaskan pada memperoleh target perusahaan yakni : efisiensi serta efektivitas operasional, kecakapan pelaporan finansial, serta ketaatan kepada undang-undang juga peraturan yang ada.

Sistem pengaturan intern dapat mempengaruhi komitmen SDM Menurut prinsip sistem pengendalian internal pada PP 60 Th. 2008 yang melaporkan jika selain bisa menurunkan resiko terbentuknya kerugian, penyelewengan serta ketidaktaatan faktor kehati-hatian, sistem pengendalian pun memikirkan faktor nilai etika, integritas, akhlak, serta komitmen basis daya selaku kerangka pembangunan sistem pengendalian, dimana pada aturan tersebut diklaim jika sistem pengendalian internal yang efisien ialah bagian yang amat krusial pada perusahaan serta jadi pokok untuk aktivitas operasi yang aman serta nyaman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yang mengemukakan jika moralitas memengaruhi positif signifikan kepada pencegahan *fraud*. Moralitas besar yang digambarkan pada sikap baik seorang individu serta hendak memengaruhi penghindaran ketidakjujuran.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi)

Tabel 7

Hasil Moderated Regresi Analysis (MRA)

Variabel	Koefisien	T	Sig	Kesimpulan
(Constant)	31.666	4.481	0.000	
Budaya (X ₂)	0.226	2.217	0.024**	Signifikan
Moralitas (Z)	0.547	1.976	0.049**	Signifikan
X ₂ *Z	0.018	2.445	0.015**	Signifikan

**mengindikasikan signifikansi pada tingkat 5%,

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari model regresi di atas, diperoleh informasi jika angka b₂ (signifikan), dan nilai b₃ (juga signifikan), perihal tersebut membuktikan jika moralitas individu ialah variabel *quasi moderator* artinya variabel moralitas individu bisa berfungsi selaku variabel moderasi serta juga selaku variabel bebas, alhasil bisa diteruskan dengan pengujian hipotesis. Bersumber pada Tabel 7, didapatkan t_{hitung} interaksi 4,445 > t_{tabel} 1,971, dengan nilai P_{value} 0,015 < 0,05, sehingga H₅ diterima. Serta bisa ditarik kesimpulan jika ikatan variabel budaya organisasi serta moralitas individu (X₂*Z) mempunyai pengaruh signifikan kepada pencegahan *fraud* (Y). Nilai β (Beta) yang positif menandakan jika moralitas individu memperkokoh pengaruh budaya organisasi kepada pencegahan *fraud*.

Bersumber pada hasil pengujian hipotesis menunjukkan jika moralitas individu memperkokoh pengaruh budaya organisasi kepada penghindaran *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa moralitas yang dipunyai pegawai yang baik mendorong budaya yang bagus pula, alhasil ketidakjujuran bisa dihindari. Makin besar moralitas individu yang dipunyai seorang karyawan maka akan memberikan kerutinan budaya yang bagus. Adat baik tersebut selanjutnya jadi sistem nilai yang berperan selaku prinsip serta standar perilaku yang sopan maupun tidak sopan yang dilakukan oleh seorang pegawai guna meningkatkan kepedulian dan pencegahan terhadap kecurangan. Budaya organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi, karena semua pihak di perusahaan hendak menumbuhkan jiwa loyalitasnya kepada perusahaan serta hendak berkomitmen pada mencapai target perusahaan dengan menumbuhkan budaya organisasi di tiap orang di perusahaan, sehingga hendak menghindari maupun memperkecil terjadinya *fraud*.

Anti-fraud awareness adalah upaya yang dilaksanakan manajemen serta karyawan dengan bersama. Tetapi, membentuk adat etika kejujuran yang baik wajib berasal dari manajemen yang baik pula. Manajemen hendak jadi peran penting untuk karyawan alhasil mereka hendak mengikuti sikap manajemen. Tidak hanya itu, manajemen pun berkewajiban guna memitigasi resiko terbentuknya ketidakjujuran lewat evaluasi area pekerjaan yang positif serta nyaman yang menunjang terjadinya ketidakjujuran. Bagi karyawan, pemahaman anti kecurangan hendak menumbuhkan afeksi kepada resiko penyelewengan yang bisa terbentuk di area kerja. Ketidakjujuran hendak lebih mudah diketahui serta ditangkal dengan sendirinya sebab karyawan telah memiliki pemahaman serta afeksi kepada ancaman aksi ketidakjujuran di area perusahaan.

Tanpa terdapatnya motivasi nilai-nilai akhlak pada kehidupan sosial, akibat yang ditimbulkan pasti amat tinggi. Contohnya, munculnya sikap yang menyeleweng, termasuk praktek yang merugikan. Bernilainya refleksi serta pengokohan nilai-nilai akhlak, termasuk pula nilai spiritual yang diterangi akal budi yang sehat, jadi amat krusial guna lebih ditekankan serta meningkatkan kata hati. Dengan kata hati yang sanggup memilah mana yang baik serta buruk maupun mana yang benar serta salah, tiap-tiap orang bisa turut memberikan evaluasi kondisi yang lebih bagus. (LPSK, 2011).



Pengaruh Anti Fraud Awareness terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Tabel 8

Hasil Moderated Regresi Analysis (MRA)

Variabel	Koefisien	t	Sig	Kesimpulan
(Constant)	66.430	6.980	0.000	
Anti Fraud (X3)	0.707	3.139	0.002**	Signifikan
Moralitas (Z)	1.366	3.622	0.000**	Signifikan
X3*Z	0.039	4.335	0.000**	Signifikan

**mengindikasikan signifikansi pada tingkat 5%,

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari model regresi tersebut diperoleh informasi jika angka b2 (signifikan), dan nilai b3 (juga signifikan), perihal tersebut menandakan jika moralitas individu ialah variabel *quasi moderator* artinya variabel moralitas individu bisa berfungsi selaku variabel moderasi serta juga selaku variabel bebas, alhasil bisa diteruskan dengan pengujian hipotesis. Tabel 8 memperoleh t_{hitung} interaksi 4,335 > t_{tabel} 1,971, dengan nilai P_{value} 0,000 < 0,05, alhasil H5 diterima. Jadi bisa ditarik kesimpulan jika ikatan variabel *anti-fraud awareness* serta moralitas individu ($X_3 * Z$) mempunyai pengaruh yang signifikan kepada pencegahan *fraud* (Y). Angka β (Beta) yang positif membuktikan jika moralitas individu memperkuat pengaruh *anti-fraud Awareness* kepada penghindaran kecurangan.

Bersumber pada hasil pengujian hipotesis, moralitas individu memengaruhi *anti-fraud awareness* kepada pencegahan kecurangan. Perihal tersebut dikarenakan masing-masing individu memiliki moral yang memotivasi evaluasi kondisi menjadi lebih baik, terutama lewat kesadaran terhadap kecurangan. Kesadaran anti frau diperkuat dengan moralitas individu yang baik sangat efektif untuk meningkatkan pencegahan *fraud*.

Hasil riset ini menunjukkan jika moralitas individu dapat memoderasi pengaruh *anti-fraud awareness* kepada penghindaran kecurangan. Artinya semakin tinggi kesadaran *anti-fraud* yang dimiliki individu, maka orang itu memungkinkan guna menambah moralitas individunya serta melaksanakan sesuatu dengan benar juga hendak menghindari sikap *fraud* ataupun bisa dibidang jika makin besar moralitas individu alhasil makin kecil kecondongan guna melaksanakan *fraud*. Karyawan yang mempunyai akhlak yang bagus saat bekerja artinya karyawan pun mempunyai kontribusi yang besar kepada perusahaan. Dengan begitu, pegawai hendak berminat kerja totalitas guna pertumbuhan pemerintah. Sedangkan, bila mempunyai akhlak yang rendah, alhasil petugas tidak minat untuk bekerja, serta hendak memikirkan bahwa perihal itu wajar disebabkan minimnya afeksi kepada baik maupun kurangnya output tugas yang dilaksanakan, jadi disaat karyawan itu berbuat aksi ketidakjujuran mereka hendak menganggap hal itu biasa saja.

SIMPULAN

SPIP mempunyai pengaruh positif kepada pencegahan *fraud*. Pengaruh SPIP kepada penangkalan kecurangan ini membuktikan jika target organisasi sudah berjalan efektif dan efisien untuk melakukan pencegahan fraud, Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif kepada pencegahan *fraud*. Perihal tersebut membuktikan budaya itu hendak membuahkan nilai fundamental perusahaan yang baik dengan adanya budaya organisasi yang bagus alhasil usaha penghindaran ketidakjujuran jadi bertambah. *Anti-Fraud Awareness* mempunyai pengaruh positif kepada pencegahan *fraud*. Berpengaruhnya *anti-fraud awareness* disebabkan karena pegawai sudah memiliki dan menanamkan kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan *fraud*, sehingga kesadaran tersebut mampu meningkatkan penghindaran ketidakjujuran. Moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah kepada pencegahan *fraud*.

Dengan baiknya akhlak menyebabkan penerapan sistem pengaturan dalam pemerintah menjadi lebih efektif hal tersebut akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam organisasi. Moralitas individu pun memperkuat pengaruh budaya organisasi kepada pencegahan *fraud*. Perihal itu dikarenakan akhlak yang dipunyai karyawan yang baik, sehingga mampu melaksanakan budaya perusahaan dengan baik pula, dengan baiknya budaya organisasi hendak menumbuhkan penghindaran ketidakjujuran. Moralitas individu memperkuat pengaruh *anti-fraud awareness* kepada pencegahan *fraud*. Perihal itu dikarenakan tiap-tiap orang memiliki moralitas yang akan motivasi evaluasi kondisi menjadi lebih baik, terutama lewat kesadaran terhadap kecurangan. Kesadaran *anti-fraud* diperkuat dengan moralitas individu yang baik, sangat efektif untuk meningkatkan penghindaran ketidakjujuran.

Keterbatasan pada riset ini yakni menggunakan metode survei dengan memakai kuesioner dan peneliti tidak bisa memantau jawaban responden, maka memungkinkan jika pengisian kuesioner bukan oleh responden yang dikriteriakan, maka opini responden belum tentu menggambarkan realitanya. Riset ini hanya melihat opini jawaban responden, belum dilengkapi dengan kalkulasi yang sempurna guna mengetahui upaya pencegahan *fraud* pada sektor pendidikan. Perihal tersebut hendak memunculkan persoalan bila opini responden berbeda dengan realitanya.

Saran yang dapat dibagikan pada riset ini yakni: seharusnya dapat menambah SPIP dengan lebih efektif lagi, karena SPIP yang efektif terbukti dapat meningkatkan pencegahan *fraud*, untuk itu perlu ditingkatkan di antaranya fungsi pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan pelaporan keuangan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pemerintah dapat meningkatkan budaya organisasi, diantaranya menciptakan budaya yang baik, misalnya menanamkan budaya kejujuran dan beretika kepada pegawai dan pimpinan organisasi memberikan contoh perilaku yang baik. *Anti-fraud Awareness* juga salah satu upaya pencegahan *fraud*, untuk itu organisasi dapat menanamkan kesadaran pada pegawai untuk tidak berbuat curang, diantaranya memperkerjakan atau memberikan jabatan pada orang yang jujur, menyediakan pelatihan kesadaran akan adanya kecurangan, dan memberikan program dukungan pegawai. Moralitas individu juga salah satu upaya pencegahan *fraud*, untuk itu penting bagi organisasi untuk memperhatikan pegawai yang terindikasi memiliki moral yang tidak etis, dengan tidak menempatkannya pada posisi jabatan yang berkaitan dengan keuangan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Pendidikan untuk bisa meminimalkan kesempatan terjalannya perbuatan ketidakjujuran sebab tiap aksi *fraud* bisa diketahui secara cepat serta ditangani dengan baik oleh organisasi dengan cara mengimplementasikan sistem Pengendalian Internal yang optimal, meningkatkan moralitas dan kesadaran pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kinerjanya serta menyesuaikan budaya organisasi yang telah dilaksanakan agar dapat lebih menekan terjadinya *fraud*.

REFERENSI

- Alfian, N., Subhan., dan Rahayu, R. P. (2018). Penerapan *Whistleblowing System* dan *Surprise Audit* Sebagai Strategi Anti Fraud Dalam Industri Perbankan, *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, Vol. 8. No. 2, p. Hal. 1-8.
- Anandya, C. R., dan Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT . Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10. No. 2. Hal. 185-194.
- Ariastini, N. K. D., Yuniarta, G. A., dan Kurniawan, P. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Proactive Fraud Audit*, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos Se-kabupaten Klungkung, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol.8. No. 2.



- Asiah, N., dan Rini, D. S. (2017). Pengaruh *bystander effect* dan *whistleblowing* terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan, *Jurnal Nominal*, Vol. 6. No. 1, p. Hal. 109-123.
- Astriyani, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintah Daerah Kota Palu', *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 5. No. 5. Hal. 180-188.
- Diah, H (2020) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Pengaruh Whistleblowing Dan Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi. *thesis*, Unsada.
- Go.Riau.com. 2020. Terima Dana BOS, SDN 167 Pekanbaru Diduga Tetap Jual LKS, Bupena dan Pungut Uang Komputer', *Go.Riau.com*. Available at: <https://www.goriau.com/berita/baca/terima-dana-bos-sdn-167-pekanbaru-diduga-tetap-jual-lks-bupena-dan-pungut-uang-komputer.html>.
- Hambani, S., Warizal, W., dan Kusuma, I. C., R. (2020). Analisis Faktor Yang Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor), *Jurnal Akunida*, Vol. 6. No. 2, p. Hal. 69-84.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., dan Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa', *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1. Nol. 1, p. Hal. 586-618.
- Indonesian Corruption Watch. *Tren Korupsi 2018-2020*, *Anti-Korupsi*. Available at: <https://www.antikorupsi.org/id/tren>.
- Irawan, S. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Andir Kota Bandung). Universitas Pasundan Bandung.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Laksmi, S.P Putu; Sujana, I Ketut (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 26, n. 3, p. 2155 - 2182, DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Naulita, D. M. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Anti-Fraud Awareness* dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan *Fraud*, *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Wulandari (2017) pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi finansial terhadap kecenderungan fraud(studi empiris pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo) *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*. Vol. 06 No. 01 Februari. 1-13.